

# Pesta Demokrasi: Berkah atau Mimpi Buruk?

Bagi perempuan, konsep 'demokrasi' bisa menjadi satu hal yang sangat diidam-idamkan namun sekaligus juga mimpi buruk. Demokrasi yang diwariskan tradisi Yunani, jelas tidak mengikut-kan perempuan dan budak. Bahkan kaum liberal awal dengan mudahnya mengatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa mengkaitkan bahwa perempuan juga berharap bisa memilih dalam pemilu. Terkadang demokrasi juga digunakan sebagai justifikasi akan superioritas suku, agama dan gender tertentu.

Di Indonesia sendiri, paling tidak ada dua persoalan perempuan dalam politik, pertama masalah keterwakilan perempuan yang sangat rendah di ruang publik dan kedua, masalah belum adanya platform partai yang secara konkrit membela kepentingan perempuan. Kalangan feminis sendiri yakin, bahwa memberi tempat lebih banyak bagi perempuan dalam dunia politik akan memberikan angin segar dan harapan bagi perubahan politik yang arogan, korup dan patriarkis.

Itulah sebabnya mengapa mematok kuota 30 % perempuan di parlemen dalam Pemilu 2004 dianggap sangat penting dalam rangka tindakan afirmatif (affirmative action) guna memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan berkiprah dalam politik. Basis pemikiran lainnya adalah keyakinan bahwa dengan maju ke ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan mereka terwakili. Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada perubahan sistem yang berkeadilan dan bersih dari korupsi (good governance). Diyakini, masuknya perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi penting dalam rangka menciptakan dunia yang baru, dunia yang bebas diskriminasi.

Sudah waktunya memang, perspektif gender masuk ke segala lini kehidupan terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Jika hal tersebut selama ini belum sempat dilakukan tak lain

karena kehidupan sosio-politik Indonesia hanya dilihat melulu dari kacamata laki-laki. Sementara warga perempuannya sendiri kian terpinggirkan dan dianggap tidak layak memasukinya. Politik dianggap sebagai dunia yang kejam dan kotor.

Dari daftar caleg saat ini, kita juga banyak melihat jajaran artis perempuan yang tidak benar-benar memahami isu-isu dan kebutuhan perempuan lokal. Pada titik ini, seperti pernah diutarakan oleh seorang tokoh feminis politik Mary O'Brien, perempuan hanya digunakan sebagai alat oleh partai demi alasan 'pembaharuan dunia' (in the name of a vision that transforms the world). Mereka semata menjadi alat politik dan akhirnya lagi-lagi menjadi kaum mayoritas yang inferior dan terbungkam (silenced and thwarted majority). Perempuan oleh masyarakat dipaksa untuk menerima diri mereka sebagai pembawa hal baru dalam tahap-tahap perpolitikan, namun minimnya pengalaman dan pengetahuan serta akses yang sulit ke kancah politik membuat mereka hanya menjadi figuran.

Sejarah yang sudah lama ada melalui rangkaian konvensi yang sangat kuat membuat perempuan tersisih dari dunia politik melalui perbedaan antara peran privat dan publik. Secara serius, perbedaan ini memotong akses perempuan ke lingkup publik. Ia terus menerus dipatok pada kewajiban-kewajiban di lingkup privat yang menghabiskan hampir seluruh waktunya setiap hari. Harusnya negara juga melindungi aktivitas perempuan di dunia perpolitikan, sebuah langkah konkrit yang dapat kita pelajari dari negara tetangga adalah dengan melarang rapat-rapat partai dan parlemen hingga larut malam, tidak merokok di dalam ruangan rapat, hingga kebijakan yang mengakomodir kebutuhan yang spesifik bagi perempuan misalnya ruang penitipan anak maupun ruang menyusui. Intinya politik haruslah ramah terhadap perempuan.

Suara perempuan dalam pemilu, kini begitu bermakna, pesta demokrasi kelak akan berujung di kotak suara. Disanalah harapan besar para pembela hak-hak perempuan guna meloloskan beberapa Rancangan Undang-undang (RUU) yang secara spesifik melindungi perempuan. Perempuan menantikan RUU kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, perlindungan saksi dan korban, serta perlindungan buruh migran dan keluarganya segera menjadi undang-undang. (AV)